

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dalam perkembangannya, kota Surabaya dikaitkan dengan aktivitas perdagangan karena letak geografisnya yang berdekatan dengan pelabuhan. Pada abad XIX pada zaman pemerintahan kolonial Belanda karena memiliki letak geografisnya yang strategis memposisikan kota Surabaya sebagai pelabuhan utama ujung Timur Pulau Jawa berperan sebagai jalur perdagangan di daerah Timur Pulau Jawa.¹

Indonesia dan China sudah lama menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Seiring dengan berkembangnya zaman, salah satu kota yang ada di China yang bernama Kota Xiamen yang sudah mulai membuka diri untuk melaksanakan kerjasama antar kota yang ada di dunia yang awalnya adalah di bidang perdagangan.² Kota Xiamen menjadi kota yang modern di China dan mulai menjadi tempat wisata di China dengan keanekaragaman budaya.³

¹Anonim. 2019. Sejarah Singkat Kota Surabaya.(daring).Tersedia di: <http://surabaya.go.id/id/page/0/4758/sejarah-kota-surabaya>. diakses 27 Agustus 2019.

²Anonim. 2006. Surabaya Jalin Kerjasama Dengan Xiamen (daring). Tersedia di <http://www.merdeka.com/khas/surabaya-jalin-kerjasama-sister-city-dengan-xiamen-lsyxdvo.html>. diakses 28 Agustus 2019.

³Anonim. 2017. Xiamen Mutiara Baru Tiongkok (daring), Tersedia di <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3171886/xiamen-mutiara-baru-tiongkok>. diakses 28 Agustus 2019.

Gambar 1.1 Logo Kota Surabaya



Sumber: www.surabaya.go.id⁴

Seperti yang diketahui bahwa, kerja sama kota kembar adalah sebuah konsep kesamaan dua kota yang berbeda lokasi dan memiliki kesamaan dengan aktor utamanya yaitu bukan negara (*non state*).⁵ Kerja sama kota kembar sangat bermanfaat sekali terhadap program yang direncanakan seperti pertukaran pelajar, pembangunan, maupun kerjasama dalam mempromosikan budaya tersebut.

Di Indonesia fenomena kerja sama kota kembar sudah banyak terjadi di beberapa kota di Indonesia, termasuk Kota Surabaya dengan Kota Xiamen. Tujuan kedua kota ini adalah menginginkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengalaman ataupun kelebihan untuk mengembangkan kotanya masing-masing. Dengan adanya kesamaan ini, diharapkan kedua kota dapat berbagi pengalaman

⁴Anonim. 2019. *Lambang Kota Surabaya* (daring). Tersedia di [http:// www.surabaya.go.id/](http://www.surabaya.go.id/). Diakses pada 16 September 2019.

⁵Anonim. 2014. Apa Saja Yang Dilakukan Satu Kota Dengan Kota Kembaranya (Daring) Tersedia di: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-07-30/onlineapa-saja-yang-dilakukan-satu-kotadengan-kotakembaranya/1350054>. Diakses pada 11 Maret 2019.

dalam penyelesaian masalah yang ada dan mewujudkan kepentingan daerah masing-masing.

Hubungan kerjasama kota kembar antara Kota Surabaya dengan Xiamen sudah berlangsung sejak tahun 2003 dengan ditandai penandatanganan *letter of intents* (LoI) ketika Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono.⁶ Namun nota kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2006.⁷ Kerjasama ini berlanjut pada tahun 2010 ketika Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini. Pada priode kedua, kedua kota sepakat untuk memperpanjang nota kesepahaman yang telah disepakati pada priode sebelumnya.⁸

Kerjasama kota kembar merupakan salah satu kegiatan diplomasi publik, karena kedua kota saling melakukan interaksi maupun promosi yang bertujuan untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Diplomasi publik juga sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mengetahui kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah. Namun di Indonesia sendiri diplomasi publik tidak hanya digunakan oleh pemerintah pusat namun digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan keluasan

⁶Anonim. 2006. Surabaya Jalin Kerjasama "Sister City" (Daring). Tersedia di <https://www.merdeka.com/khas/surabaya-jalin-kerjasama-sister-city-dengan-xiamen-lsyxdvo.html> Diakses pada 11 September 2019.

⁷*ibid*

⁸Anonim. 2015. Wawali Xiamen Kunjungi Surabaya Perkuat "Sister City" (Daring). Tersedia di: <https://jatilim.antaranews.com/berita/162213/wawali-xiamen-kunjungi-surabaya-perkuat-sister-city> Diakses pada 11 September 2019.

kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kerjasama dalam maupun luar negeri dalam usaha mengembangkan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas muncul sebuah pertanyaan “Bagaimana implementasi diplomasi publik yang terjadi dalam kerjasama kota kembar antara Kota Surabaya dan Kota Xiamen dalam bidang sosial budaya tahun 2010-2015” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan semakin tingginya persaingan di era globalisasi, kedua kota ini menjalin kerjasama dalam bidang kebudayaan yang ingin menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas memiliki wawasan luas, kreativitas dan dapat membuat daerahnya berkembang sehingga terjadilah kerjasama kota kembar dalam bidang sosial kebudayaan. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan implementasi diplomasi publik melalui kerjasama kota kembar dalam bidang sosial budaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang pertama adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa kerjasama yang dilakukan di era sekarang tidak hanya dilakukan negara dengan negara, tetapi dapat dilakukan oleh aktor di bawah negara seperti pemerintah daerah. Kedua adalah menjelaskan bahwa kerjasama sosial kebudayaan menjadi fokus utama dalam tantangan global. Ketiga memberikan pengetahuan pembaca bahwa pameran lintas budaya ataupun pertukaran pelajar merupakan bentuk dari implementasi diplomasi publik dari kerjasama kebudayaan. Dan yang terakhir menambah bahan pustaka untuk program studi Hubungan Internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis

Peringkat analisis dalam studi hubungan internasional adalah untuk menjelaskan tentang kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini peringkat analisis menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri dan pembuat kebijakan luar negeri. Terdapat lima peringkat analisis dalam hubungan internasional.⁹ Yang pertama adalah individu dimana individu dilihat dari pemimpin negara. Pemimpin dalam kebijakan luar negeri adalah yang mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu. Jadi pemimpin suatu negara disini sebagai seseorang yang menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara sehingga memberikan dampak terhadap suatu negara. Jika pemimpin tersebut berbicara maka dapat diartikan bahwa negaralah yang berbicara.

Kedua adalah kelompok negara-bangsa dimana kelompok negara-bangsa yang berperan merupakan kelompok yang tidak hanya dalam pembuatan kebijakan tersebut tetapi lebih kepada prosesnya. Kelompok-kelompok ini yang mempengaruhi pembuatan kebijakan karena adanya pengaruh dari kekuatan yang lebih untuk memikirkan yang terbaik untuk negaranya. Ketiga identitas, identitas disini mempengaruhi perilaku suatu negara sehingga negara tersebut membuat suatu kebijakan luar negeri. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya

⁹Valerie M Hudson. 2005. Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International relations. Bigham Young University.

ialah dengan menggunakan kebudayaannya. Maksudnya strategi kebudayaan disini ialah kita melihat budaya negara A terlebih dahulu, terus memperhatikan juga negara B seperti apa lalu nantinya akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara A seperti apa terhadap negara B terus negara menentukan arah kebijakan luar negerinya terhadap negara B.¹⁰

Keempat adalah politik domestik dan *LoA* media di mana tidak hanya politik domestik yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, namun opini publik dan media pun juga mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Opini publik dan media saling berhubungan di mana hubungannya terletak pada media bisa menyampaikan aspirasi atau menyiarkan opini publik atau pemberitaan media tentang pemerintah.

Yang terakhir adalah *national attribute* dan *internasional sistem*. Dalam kajian ilmu hubungan internasional atribut nasional merupakan kekuatan nasional yang menganggap bahwa negara merupakan aktor utama dalam menjalankan proses kebijakan. Pada peringkat analisis ini negara tidak lagi di pecah-pecah menjadi beberapa bagian seperti halnya peringkat analisis yang lainnya. Dalam peringkat analisis atribut nasional mempunyai tujuh variabel di dalamnya diantaranya *size*, *size* disini dilihat dari ukuran negara. *Size* dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana negara dengan ukuran kecil dapat menjalin kerjasama dengan negara besar. Kedua sumber daya alam. Sumber daya alam bagi suatu negara sangat di butuhkan sehingga dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Ketiga variabel geografi

¹⁰Valerie M Hudson. 1999. Cultural Expectations of One's Own and Other Nations' Foreign Policy Action Templates. Political Psychology.

dimana kondisi geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Keempat demografi dimaksudkan meliputi gender, jumlah kependudukan. Kelima sistem politik. Sistem politik disini mempunyai dua variabel diantaranya demokrasi dan non demokrasi. Negara demokrasi lebih cenderung tidak menentang negara demokrasi lainya tetapi negara non demokrasi lebih cenderung menentang setiap kebijakan yang dibuat oleh negara demokrasi. Yang terakhir kapasitas militer. Dalam hal ini dilihat dari kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara terkait jumlah alutsista negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Contohnya seperti yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat yang setiap tahunnya menambah alokasi anggaran untuk memperkuat militernya.¹¹ Sedangkan sistem internasional adalah interaksi yang dilaksanakan antar negara yang sekaligus menjadi panggung negara untuk melakukan politik luar negerinya. Sistem internasional dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dengan melihat beberapa variabel seperti militer dan ekonomi. Karena sistem internasional berkaitan dengan power dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Contohnya seperti Amerika Serikat yang merupakan negara yang mempunyai *power* di dunia internasional sehingga kebijakan yang dikeluarkannya dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹²

¹¹Valerie Hudson (2007). Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory, Rowman & Littlefield; Ch.6. pp. 143-164.

¹²Marijke Breuning., 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave MacMillan.

Penelitian ini tidak menggunakan peringkat analisis karena penelitian tidak membahas kebijakan suatu negara tetapi membahas kebijakan pemerintah daerah yaitu implementasi kerjasama kota kembar antara Pemerintah kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Xiamen.

1.5.2 Landasan Teori dan Konsep

1.5.2.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik adalah salah satu bagian dari diplomasi. Diplomasi publik adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya¹³ Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi publik meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah.¹⁴ Diplomasi publik membuka ruang bagi masyarakat secara individu maupun kelompok memberikan masukan terhadap kebijakan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuat oleh pemerintah suatu negara.¹⁵ Diplomasi publik memiliki tujuan memberikan pandangan dan informasi positif tentang kebijakan suatu negara kepada masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yaitu aktor bukan negara seperti media masa, NGO dan individu.

¹³J Wang. 2006. Public Diplomacy and Global Business. The Journal of Business Strategy 27 (3), p. 49-58. <http://proquest.umi.com>, Diakses 02 Maret 2020.

¹⁴*ibid*

¹⁵Mohammad. Shoelhi, 2011. Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Menurut Mark Leonard, diplomasi publik mempunyai tiga dimensi yaitu :

a. Politik/militer. b. Ekonomi. c. Sosial atau budaya.¹⁶ Dimensi politik yang dimaksud di sini yaitu bereaksi terhadap acara berita yang terjadi dengan berdasarkan tujuan dan strategi yang telah disepakati. Jadi kampanye politik bertujuan untuk menetapkan pesan dan merencanakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat hubungan diplomasi publik. Kedua dimensi ekonomi, yaitu secara proaktif membuat agenda berita melalui kegiatan dan acara yang dirancang untuk memperkuat inti dari pesan dan nantinya akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam dimensi ekonomi, kekuatan persepsi akan menjadi jelas karena menentukan hubungan diplomasi dimensi ekonomi apakah sebagai produk atau investasi. Hal tersebut akan membuat daerah akan dapat memajukan perekonomian jika memiliki persepsi yang sama.¹⁷

Yang terakhir adalah dimensi sosial budaya, dimana dimensi yang ketiga ini merupakan dimensi yang berfokus di dalam penelitian ini, karena dimensi ini berfokus terhadap hubungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terhadap mitra kerja sama akan lebih intensif dilakukan. Kunci keberhasilannya adalah melalui kegiatan pertukaran pelajar maupun kegiatan pameran lintas budaya, dan memberitahukan publik melalui akses media.¹⁸ Seperti yang diketahui bahwa membangun hubungan berbeda dengan menjual pesan karena melibatkan pertukaran yang mulus dan berarti bahwa orang-orang akan diberi gambaran mengenai negaranya.¹⁹

¹⁶Mark Leonard, et.al. 2002. Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre.

¹⁷*ibid*

¹⁸*ibid*

¹⁹*ibid*

Di dalam diplomasi publik, komunikasi dipakai sebagai alat promosi hingga keluar negeri, biasanya penyebaran informasi dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui film, budaya, hingga pendidikan.²⁰ Diplomasi publik di sini berguna untuk mengurangi tanggapan yang buruk dari dunia terhadap suatu negara dan diplomasi publik juga akan menarik simpati dari masyarakat atas pengertian ide dan kreativitas yang dilakukan oleh pemerintah. Diplomasi publik berbeda dengan propaganda karena diplomasi publik bersifat terbuka sedangkan propaganda mencoba agar orang lain mau menerima kehendak. Diplomasi publik dalam pelaksanaannya melibatkan publik yang bertujuan menyukseskan dalam menjalankan politik luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik dapat menumbuhkan kepercayaan daerah atau negara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan solusi terhadap daerah atau negara yang bersangkutan apabila ingin melakukan kerjasama dalam berbagai bidang.²¹

Menurut Christopher Roos ada tujuh pilar di dalam diplomasi publik pertama adalah adanya kordinasi kebijakan pada tataran nasional maksudnya disini adalah harus memahami kebijakan yang diambil sebelum disampaikan kepada publik. Kedua harus ada alasan yang rasional terhadap dukungan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ketiga pesan yang disampaikan kepada publik harus dari sumber-sumber terpercaya, kredibel, dan dapat dipercaya publik sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat dukungan dari publik. Keempat menghindari kontradiksi dalam pembuatan pesan untuk menghindari adanya perpecahan dan opini publik yang

²⁰*ibid*

²¹Walter Lippman. 1994. Opini Umum. Terjemahan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

negatif terhadap pemerintah. Kelima aktor dalam berjalannya diplomasi sangat begitu luas dan beragam, maka perlu memanfaatkan alat komunikasi seperti internet, media masa dan pertukaran budaya. Keenam memperluas kerjasama dengan sektor swasta dan aktor non negara lainnya. Yang terakhir adalah perlu dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman.²²

Salah satu ciri pembawaan opini publik adalah bahwa rakyat akan kurang melakukan perlawanan terhadap keputusan yang diambil oleh suatu pimpinan daerah, terutama dalam keadaan krisis atau untuk memajukan suatu daerahnya.²³

Aktor yang melaksanakan diplomasi publik tidak hanya negara, tetapi aktor non negara seperti media, kelompok masyarakat, partai politik, hingga aktor non negara lainnya.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa di dalam diplomasi publik terdapat dua aktor yaitu negara dan bukan negara. Aktor bukan negara sendiri memiliki aktor yang terdiri dari bagian pemerintah atau negara yang disebut sebagai sebuah kelompok atau daerah. Sebuah kelompok atau daerah dijelaskan sebagai aktor yang dibawah pengawasan negara atau yang disebut paradiplomasi.

1.5.2.2 Paradiplomasi

Paradiplomasi adalah suatu kelompok kecil yang di bawah naungan negara yang melakukan hubungan luar negeri yang bertujuan untuk mencapai kepentingannya.²⁵ Paradiplomasi muncul seiring dengan berkembangnya globalisasi sehingga aktor bukan negara bisa melakukan hubungan luar negeri yang

²²Christopher Ross. 2003. Pillars Of Diplomacy, dalam Harvard International Review. [daring]. Tersedia di <http://hir.harvard.edu/article/?a=1117>. Diakses pada 6 Juli 2003.

²³Mark McDowell. Op.Cit

²⁴*ibid*

²⁵Corneliu Bjola, dan Markus Komprobst. 2013. Understanding International Diplomacy: Theory, practice and ethics. New York: Routledge.

membuat aktor non negara sama pentingnya dengan negara dalam hal melaksanakan hubungan internasional. Paradiplomasi dinilai sangat penting terhadap masyarakatnya sehingga fokus utama dalam melaksanakan hubungan internasional adalah pengembangan daerah.²⁶

Menurut Aldecoa paradiplomasi mempunyai makna yaitu “*the foreign policy of non central government*” yang berarti kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah bisa dengan leluasa melaksanakan kerja sama luar negeri dengan pihak manapun.²⁷ Pemerintah daerah mempunyai hak otonomi sendiri dalam menentukan arah dalam melaksanakan hubungan internasional. Pemerintah daerah tidak lagi terpaku terhadap pemerintah pusat dalam hal melakukan hubungan internasional namun pemerintah daerah disini harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat sebagai pengawas karena pemerintah daerah masih di bawah naungan pemerintah pusat.²⁸ Namun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan tertinggi dari batas kewenangan otonomi yang dimiliki. Pada umumnya wujud dari paradiplomasi adalah kerja sama kota kembar.²⁹

²⁶Stefan Wolff. 2007. “Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges” dalam The Bologna Center Journal of International Affairs. Vol. 10. Universitas Nottingham. {daring}. Tersedia di <http://www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf> . Diakses pada 21 November 2019.

²⁷David Crikemans, 2008 “Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?”, hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium. Dikutip oleh Takdir Ali, 2013, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, Yogyakarta. Hal.38.

²⁸*ibid*

²⁹Corneliu Bjola, dan Markus Komprobst. 2013. Understanding International Diplomacy: Theory, practice and ethics. New York: Routledge.

Paradiplomasi memiliki tujuan yang beragam antara lain pemahaman dan kesadaran aktor sub nasional dalam diplomasi, pengaturan kapasitas dan kapabilitas aktor sub-nasional hingga memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah. Paradiplomasi akan membantu otonomi daerah di suatu negara dalam bekerjasama dengan daerah di luar negaranya sendiri. Jadi suatu daerah apabila ingin melakukan kerja sama luar negeri tanpa harus melalui pemerintah pusat disini pemerintah pusat hanya mengawasi daerah otonomi tersebut sehingga membuat kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh aktor non negara dengan cepat menyebar keseluruh pelosok dunia.

Menurut Lecours terdapat tiga macam kepentingan dari paradiplomasi yang pertama adalah kepentingan ekonomi, di mana kepentingan ekonomi disini diwujudkan dengan kerja sama perdagangan yang akan membuat semakin bertambahnya investor asing yang datang ke dalam negeri. Kedua adalah paradiplomasi yang melibatkan pertimbangan politik, maksudnya adalah untuk menunjukkan identitas politik pada suatu wilayah. Ketiga atau yang terakhir adalah paradiplomasi yang mencakup kerja sama yang lebih luas dalam hal ini kerja sama di berbagai bidang tidak berfokus kepada ekonomi saja melainkan akan melakukan berbagai macam program-program yang melibatkan pertukaran ilmu pengetahuan antar kedua belah pihak seperti pertukaran pelajar maupun budaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki berdasarkan perjanjian yang disepakati.³⁰ Yang dimaksud pertukaran ilmu pengetahuan disini

³⁰Andre Lecours. 2008. Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Development World. Netherlands: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.

ialah pemahaman kegiatan paradiplomasi tidak hanya mencari keuntungan dari ekonomi maupun politik saja namun kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan program-program yang melibatkan ilmu pengetahuan seperti pelatihan, pertukaran pelajar, maupun kunjungan lintas kebudayaan seperti diselenggarakannya pameran lintas budaya sehingga hubungan kedua belah pihak menjadi harmonis dan akan tetap terjaga dengan baik.³¹

Di Indonesia sendiri kegiatan paradiplomasi diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 maupun Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang pelaksanaan teknis kerja sama luar negeri oleh Pemda dimana dalam peraturan tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah memberikan kewenangan untuk melaksanakan otonominya berdasarkan peraturan berlaku.³² Di dalam peraturan tersebut juga mengatur kewenangan pemerintah daerah setiap melaksanakan hubungan kerja sama dengan mitra luar negerinya mempunyai batasan-batasan seperti bidang kerjasama tertentu yang boleh dilakukan seperti bidang sosial budaya yang di dalamnya ada bidang pendidikan, olahraga, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, maupun kesenian.³³ Sedangkan bidang-bidang kerja sama yang tidak boleh dilaksanakan oleh pemerintah daerah ialah kerja sama yang dapat mengganggu kedaulatan negara seperti bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.³⁴

³¹*ibid*

³²Takdir Ali Mukti. 2013. *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.

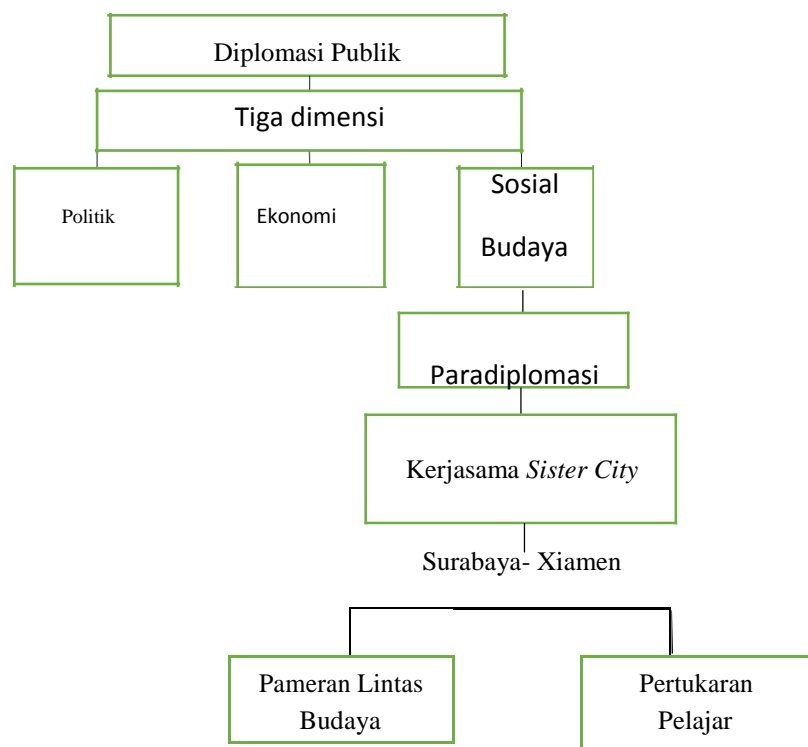
³³*ibid*

³⁴*ibid*

Dengan adanya peraturan tersebut tentu saja akan membuat hubungan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mitranya bisa berjalan dengan baik dan tidak adanya tumpang tindih antara hak, kewajiban, maupun wewenang antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri sehingga kedaulatan negara tidak terganggu.

1.6 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.3 Sintesa Pemikiran



Diplomasi publik mempunyai tiga dimensi yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara. Dengan adanya diplomasi publik membuat aktor-aktor di dalamnya seperti pemerintah daerah mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan suatu negara. Pemerintah daerah disini memberikan informasi dan

kontribusi sesuai kerja sama dengan mitra terkait mengenai beberapa bidang berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati dengan mitra terkait seperti bidang sosial budaya. Dengan adanya kerja sama bidang sosial budaya suatu daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki melalui program pameran lintas budaya maupun pertukaran pelajar. Namun di Indonesia sendiri dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri di batasi sehingga pemerintah daerah harus lebih cermat dalam melakukan kerja sama dengan mitranya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1.7 Hipotesis

Dengan adanya diplomasi publik wujud kerja sama kota kembar yang dilaksanakan oleh kedua kota berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua kota yaitu diantaranya bidang sosial kebudayaan melalui program pameran lintas budaya maupun pertukaran pelajar bisa terlaksana dengan baik. Kerjasama keduanya efektif terlaksana pada tahun 2010 dimana di tahun tersebut program kebudayaan seperti pameran lintas budaya mulai terlaksana di Surabaya dan kedua kota juga mulai aktif saling mengirimkan delegasinya untuk saling memperkenalkan budaya masing-masing melalui program pertukaran pelajar. Dengan adanya program pameran lintas budaya maupun pertukaran pelajar ini, secara tidak langsung para delegasi tersebut sudah menjadi bagian dari penghubung diplomasi antara Kota Surabaya dengan Kota Xiamen. Nantinya delegasi yang terpilih akan melakukan kegiatan seperti presentasi, mengunjungi tempat yang telah ditentukan hingga saling bertukar informasi antara satu dan lainnya.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.8.1.1 Kerjasama Kota Kembar

Kerjasama kota kembar adalah kerja sama yang dilakukan oleh suatu daerah di dalam negeri dengan mitranya yang berkedudukan sama di luar negeri yang bertujuan untuk menjalin kontak sosial antar masyarakat dan hubungan budaya.³⁵ Kerjasama kota kembar adalah kerjasama yang melihat persamaan yang dimiliki oleh kedua kota seperti persamaan budaya, latar belakang sejarah hingga segi geografis kedua kota tersebut. Kerjasama kota kembar dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan perjanjian yang telah disepakati meliputi bidang-bidang yang mempunyai potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh daerah tersebut dan suatu daerah harus mempunyai inovasi dalam pelaksanaannya agar mendapatkan hasil yang terbaik.³⁶

Yang dimaksud kerja sama kota kembar dalam penelitian ini adalah Kota Surabaya dan Kota Xiamen memiliki kesamaan dalam segi geografi, demografi, suku, maupun budaya sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk menjalin kerja sama kota kembar di bidang budaya. Kerjasama kedua kota telah terjadi selama 15 tahun sejak *letter of intents* (LoI) disepakati oleh kedua kota dan kerja sama kedua kota masih berjalan hingga saat ini.

³⁵Anonim. 2019. *Sister City*, Peluang Emas Bagi Pembangunan Di Daerah (daring), Tersedia di https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/38/sister_city_peluang_emas_bagi_pembangunan_di_daerah. Diakses tanggal 18 Desember 2019

³⁶*ibid*

1.8.2.2 Nota Kesepahaman

Yang dimaksud nota kesepahaman adalah sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya dari kesepakatan berupa kontrak yang mengikat.³⁷ Nota kesepahaman sendiri tidak terikat dengan hukum tetap sehingga dikemudian hari bisa di revisi oleh pihak terkait. Jadi bisa ditarik kesimpulan nota kesepahaman adalah sebuah dokumen kontrak yang mengikat yang digunakan sebagai landasan kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan kerjasama.³⁸

Yang dimaksud dengan nota kesepahaman telah terjadinya penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Xiamen. Perjanjian ini terjadi pertama kali pada tahun 2006 dan pada tahun 2010 adanya perpanjangan kerjasama. Pada periode kedua ini Surabaya di bawah kendali Walikota Tri Rismaharini bidang kerjasama kebudayaan paling menonjol dalam pelaksanaannya. Dalam mewujudkan program bidang kerja sama kebudayaan Pemerintah Kota Surabaya mengagendakan pameran lintas budaya maupun pertukaran pelajar yang merupakan implementasi program kerjasama kebudayaan.

1.8.3.3 Pameran Lintas Budaya

Yang dimaksud pameran lintas budaya ialah kegiatan yang dihadiri oleh para delegasi mancanegara maupun perwakilan dalam negeri untuk memperkenalkan budaya yang dimiliki yang setiap penyelenggaraannya memiliki tema berbeda.

³⁷ Anonim. tt. penyusunan-memorandum-of-understanding-mou. (daring) tersedia di : <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> diakses 24 Desember 2019.

³⁸ *ibid*

Pameran lintas budaya sendiri diselenggarakan tiap tahunnya untuk memperingati agenda-agenda penting yang telah disepakati.³⁹

Yang dimaksud pameran lintas budaya dalam penelitian ini adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang setiap tahunnya masuk agenda utama kota Surabaya. Pameran lintas budaya sendiri ialah merupakan implementasi kerja sama kota kembar yang telah disepakati dengan mitranya salah satunya Kota Xiamen. Dalam pelaksanaannya kedua kota saling mengirimkan delegasinya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kota Surabaya ciri khas budayanya masing-masing.

1.8.4.4 Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar ialah pengiriman pelajar dari daerah asal ke daerah lain di luar negeri untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar di luar negeri.⁴⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa program pertukaran pelajar ialah merupakan salah satu dari bagian pendidikan yang memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mendapatkan ilmu dari negara lain.⁴¹

Dalam penelitian ini pertukaran pelajar ialah kegiatan pertukaran delegasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Xiamen dalam rangka mengimplementasikan kerja sama program kebudayaan

³⁹Anonim. 2019. *Festival Cross Culture*, Bukti Surabaya Telah Menjadi Kota Wisata di Dunia (daring), tersedia di : <https://humas.surabaya.go.id/2019/07/21/festival-cross-culture-bukti-surabaya-telah-menjadi-kota-wisata-di-dunia/> di akses 24 Desember 2019.

⁴⁰Sri Noviyanti. 2015. Tahu Apa Untungnya Ikut program Pertukaran Pelajar? [daring]. Tersedia di <http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/20/14433531/Tahu.Apa.Untungnya.Ikut.Program.Pertukaran.Pelajar>. Diakses pada 29 Desember 2019.

⁴¹Nur Insana Imaniar. 2015. Keuntungan Mengikuti Program Pertukaran Pelajar. [daring]. Tersedia di <https://www.google.co.id/amp/www.bhataramedia.com/3262/keuntungan-mengikuti-program-pertukaran-pelajar/2015/02/26/amp> . Diakses 24 Desember 2019.

kedua kota dengan cara saling bertukar delegasi yang bertujuan untuk saling mengajarkan dan memperkenalkan budaya masing-masing yang dimiliki oleh kedua kota.

1.8.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Jadi di dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih detail sesuai rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana implementasi diplomasi publik kerjasama kota kembar antara Kota Surabaya dengan Kota Xiamen di bidang sosial budaya tahun 2010-2015.

1.8.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai tahun 2010-2015 atau di tahun kedua kerja sama antar kedua kota di tahun tersebut program-program sosial kebudayaan seperti pameran lintas budaya maupun pertukaran pelajar. Dari pameran lintas budaya maupun pertukaran pelajar nanti diplomasi publik keduanya akan berjalan sehingga dapat mengangkat citra masing-masing kota sehingga menciptakan hubungan kedua kota semakin harmonis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan peneliti memperoleh data langsung dengan menggunakan instrumen yang telah

ditetapkan. Jadi data primer di sini merupakan hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian. Sedangkan untuk data sekunder sendiri adalah data yang diambil berdasarkan data yang sudah ada seperti buku, jurnal ilmiah, artikel majalah dan koran, situs online, pidato seseorang hingga percakapan dengan orang yang bersangkutan langsung yang dilakukan pihak diluar peneliti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan analisis data kualitatif karena data-data penelitian ini menggunakan rangkaian kata-kata tidak menggunakan angka. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu kegiatan analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan analisis data memiliki pengertian sebagai sebuah proses dalam menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokanya kedalam suatu bentuk kalimat yang mudah dipahami dan di interpretasikan. Sehingga dalam analisis datanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam suatu analisis ilmiah atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya.

1.8.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Menjelaskan tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data.

BAB II: Menjelaskan mengenai proses interaksi yang dilakukan oleh Kota Surabaya dan Kota Xiamen dari proses peninjauan kerjasama hingga sampai terwujudnya program-program kebudayaan.

BAB III: Menjelaskan kegiatan kerjasama kedua kota dalam program kebudayaan.

BAB IV: Berisi kesimpulan dan saran.